

## **Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu**

**Sri Maulidiah<sup>1</sup>, Nina Yuslimi<sup>2</sup>, Ema Fitri Lubis<sup>3</sup>, Muhammad Hafizh Rahyunir<sup>4</sup>, Khotami<sup>5</sup>, Lang Buana Akbir Ramadani<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>6</sup> Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: srimaulidiah@soc.uir.ac.id

Email: ninayuslimi@soc.uir.ac.id, emafitrlubis@soc.uir.ac.id, mhafizhrahyunir@khotami@soc.uir.ac.id

### **Abstract**

*The Bandur Picak Village Consultative Body (BPD) faces various obstacles in carrying out its role in village development, including limited institutional capacity, a lack of understanding of regulations, a weak oversight function, difficulties in planning, and the suboptimal use of digital technology in village administration. These conditions have resulted in suboptimal legislative, oversight, and community outreach functions in supporting sustainable village development. This Community Service (PKM) activity aims to optimize the BPD's role in supporting sustainable village development through a participatory approach and strengthening institutional capacity. The activity is implemented through stages of socialization, outreach, and training. The outreach aims to build a shared commitment between the PKM team, the village government, the BPD, and the community. The outreach focuses on strengthening understanding of village development within the Asta Cita framework, village governance, and the BPD's strategic role in sustainable development. Meanwhile, the training emphasizes improving technical skills in developing development plans, evaluating village programs, and utilizing digital applications based on Google Docs and Google Drive. The results of the training showed an increase in the capacity of BPD members, as demonstrated by a 78% increase in participants' understanding based on pre- and post-test results, a 72% increase in their ability to prepare village planning documents, and a 65% increase in the use of digital village administration media. Furthermore, BPD members' participation in village deliberation forums increased from 60% to 90% after the training. These findings indicate that strengthening institutional capacity based on participatory training and administrative digitalization can improve the effectiveness of the BPD's function in supporting sustainable village development.*

**Keywords:** Optimization; Village Government; BPD; Development; Sustainable

### **Abstrak**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandur Picak menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya pada bidang pembangunan desa, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya fungsi pengawasan, kesulitan dalam penyusunan perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya

fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan membangun komitmen bersama antara tim PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, tata kelola pemerintahan desa, dan fungsi strategis BPD dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program desa, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota BPD yang ditunjukkan melalui peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 72%, serta peningkatan penggunaan media digital administrasi desa sebesar 65%. Selain itu, partisipasi anggota BPD dalam forum musyawarah desa meningkat dari 60% menjadi 90% setelah pelaksanaan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis pelatihan partisipatif dan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan

**Kata Kunci:** *Optimalisasi; Pemerintah Desa; BPD; Pembangunan; Partisipasi*

## **Pendahuluan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Maulidiah et al., 2023). Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan menyalurkan aspirasi Masyarakat (Agustina, 2024; Antlöv et al., 2016). Keberadaannya menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel (Ginting et al., 2023, 2024). Fungsi Strategis BPD dalam Pemerintahan Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Ardiputra et al., 2025), melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, termasuk pelaksanaan APBDesa dan pembangunan desa secara umum (Maulidiah et al., 2024).

Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif fungsi BPD dan belum secara spesifik mengkaji penguatan kapasitas kelembagaan BPD berbasis partisipasi masyarakat dan digitalisasi administrasi desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, novelty kegiatan PKM ini terletak pada integrasi penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pendekatan partisipatif, peningkatan kemampuan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, serta pemanfaatan teknologi digital administrasi desa sebagai upaya mendukung tata kelola desa yang berkelanjutan.

Desa Bandur Picak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan penguatan kearifan lokal (Hennink & Kaiser, 2022; Wang et al., 2025). Namun, optimalisasi pembangunan desa masih menghadapi berbagai

kendala kelembagaan, terutama pada fungsi BPD sebagai representasi masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi awal dan identifikasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai regulasi; (2) keterbatasan kapasitas dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa; (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa; serta (4) lemahnya sistem dokumentasi dan administrasi kelembagaan BPD. Permasalahan tersebut menyebabkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah bagaimana mengoptimalkan kapasitas kelembagaan BPD melalui penguatan pemahaman regulasi, peningkatan kemampuan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta digitalisasi administrasi desa guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sebagai upaya penyelesaian masalah, kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa serta memperkuat sistem administrasi dan dokumentasi kelembagaan berbasis digital.

Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan model penguatan kelembagaan BPD berbasis partisipatif dan digitalisasi administrasi desa. Selain mendukung implementasi pembangunan desa berkelanjutan, kegiatan ini juga relevan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Desa serta Renstra DPPM UIR 2021–2025 pada bidang sosial humaniora, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Desa Bandur Picak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi pertanian, kehutanan, maupun kearifan lokal (Hennink & Kaiser, 2022; Wang et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, keberlanjutan pembangunan desa masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan fungsi kelembagaan desa seperti BPD. BPD sebagai representasi masyarakat desa memiliki peran strategis dalam merancang, mengawal, serta mengevaluasi arah pembangunan desa (Renukappa et al., 2022; Sabet & Khaksar, 2024). Namun, potensi BPD dalam mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan seringkali belum optimal dilakukan.

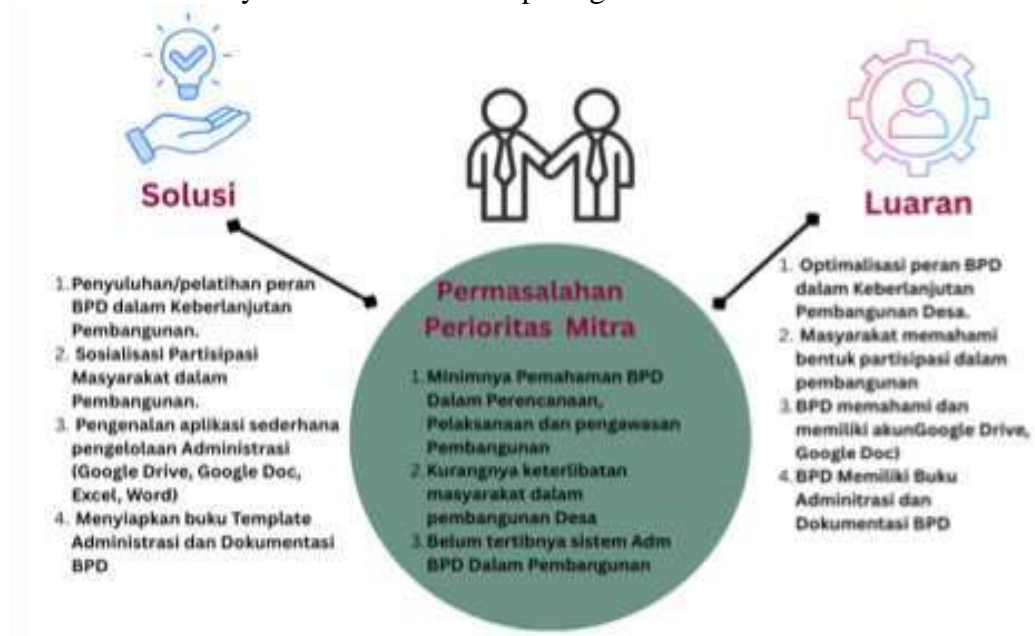


**Gambar 1.** Kegiatan Musyawarah dan Pembangunan Jalan Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPD Bandur Picak, yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sebagian anggota BPD belum sepenuhnya memahami ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Desa No. 6 Tahun 2014).
2. Keterbatasan Kapasitas dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Desa Bandur Picak.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum musyawarah menyebabkan aspirasi masyarakat belum maksimal terserap melalui BPD.
4. Kurangnya dokumen pendukung untuk dokumentasi dan administrasi BPD seperti notulensi rapat, berita acara musyawarah, maupun laporan kegiatan BPD.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi mitra oleh BPD baik masalah yang bersifat holistik maupun masalah yang bersifat prioritas adapun solusi yang direkomendasikan yaitu divisualisasikan pada gambar 2 berikut.



**Gambar 2.** Alir antara Permasalahan, Solusi, dan Target Luaran PKM Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM ini yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota BPD terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Mendorong BPD agar aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang transparan dan berkelanjutan.
3. Menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa.
4. Terpenuhi kelengkapan dokumentasi dan administrasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi BPD Bandur Picak, adapun manfaat yang diterima yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota BPD terkait penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keberlanjutan Pembangunan di Desa Bandur Picak.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan desa.

### 3. Penerapan ilmu pengetahuan di Masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam upaya realisasi perencanaan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi sehingga kegiatan PKM yang dilakukan relevan dengan Renstra DPPM UIR 2021-2025 yang berfokus pada SDGs terkait Tema Sosial Humaniora bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia dapat dilihat pada gambar 3. berikut.



Gambar 3. Renstra PKM UIR 2021-2025

Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan manfaat serta renstra perguruan tinggi maka perlu dilakukan kegiatan PKM yang bersifat kemitraan dengan tema Optimalisasi Keberadaan BPD dalam Keberlanjutan Pembangunan Desa di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu.

### Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan PKM ini menggunakan pendekatan campuran yang mengintegrasikan Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Action Research (AR) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Pemilihan ketiga pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik permasalahan kelembagaan desa yang memerlukan identifikasi kondisi lapangan secara cepat, keterlibatan partisipatif masyarakat, serta tindakan perbaikan yang bersifat berkelanjutan dan reflektif.

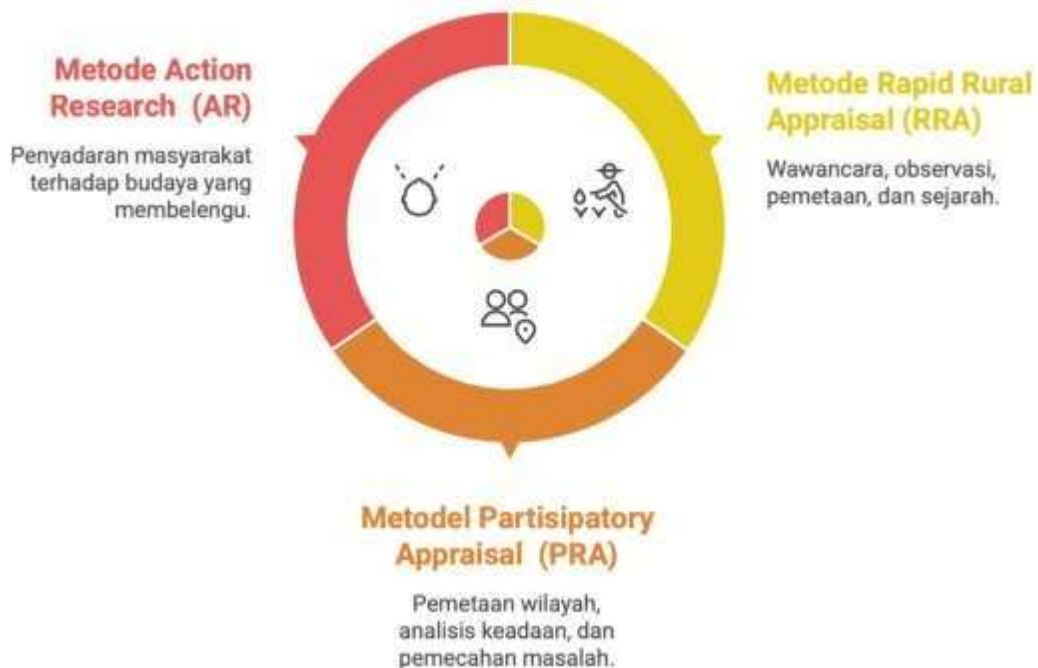
Pendekatan RRA digunakan pada tahap awal untuk memperoleh gambaran umum kondisi kelembagaan BPD secara cepat melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan pemetaan permasalahan desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas mitra secara efektif dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya, pendekatan PRA digunakan untuk meningkatkan keterlibatan partisipatif masyarakat dan anggota BPD dalam

proses identifikasi masalah, penyusunan prioritas program, serta perumusan solusi pembangunan desa. Melalui PRA, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Sementara itu, pendekatan AR diterapkan sebagai kerangka penguatan kapasitas kelembagaan melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan fungsi BPD, khususnya dalam aspek legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan model pendampingan yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan metodologis yang sistematis dan partisipatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dokumentasi, serta pre-test dan post-test terhadap peserta kegiatan. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kapasitas peserta.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan kegiatan PKM sehingga teknik tersebut dianggap dapat memecahkan masalah yang dihadapi BPD dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Metode Kegiatan PKM

Dari gambar diatas, ada tiga metode yang digunakan dalam kegiatan PKM melalui penyuluhan yaitu: 1). *Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)* yaitu dengan melakukan wawancara kepada kelompok peserta penyuluhan, melakukan observasi, pemetaan permasalahan dan memahami histori atau sejarah dan latar belakang penerima kegiatan(Entsminger et al., 2025); 2) *Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)* yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah dan analisis

keadaan, selanjutnya menentukan alternatif dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat kegiatan (Perrini et al., 2020); 3) *Metode Action Research* (AR) yaitu dengan melakukan penyadaran terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat yang sifatnya sulit untuk ditinggalkan atau membelenggu atau merancang keberlanjutan kegiatan (Goessling, 2020).

Tahapan pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini terdiri dari beberapa tahapan, divisualisasikan pada gambar 5. berikut:



Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

Penjelasan secara rinci mengenai tahapan dalam kegiatan PKM ini jelaskan pada tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Penjelasan tahapan kegiatan PKM

No.	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	Survei awal	Tahap ini melakukan kunjungan awal pemerintah desa Bandur Picak dengan tujuan ingin mengetahui permasalahan mitra sehingga bisa disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh tim PKM
	Sosialisasi	Setelah melakukan survei awal dan mengetahui masalah mitra maka tim PKM melakukan diskusi terkait kegiatan yang akan dilakukan agar dapat memberikan solusi kepada mitra. Selanjutnya melakukan sosialisasi kepada mitra Pemerintah Desa Bandur Picak untuk menjelaskan bentuk kegiatan yang akan dilakukan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, dan solusi yang direkomendasikan
	Penyuluhan	Tim PKM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan inti yaitu penyampaian materi terkait dengan (1)

		Desa sebagai penguatan pembangunan Negara, (2) Pembangunan Desa dalam Aasta Cita, (3) Kedudukan BPD dalam Keberlanjutan Pembangunan Desa
4	Pelatihan	Tahapan Pelatihan, tahapan ini tim PKM akan memberikan pelatihan secara teknis terkait (1) Perumusan perencanaan pembangunan, (2) Evaluasi pelaksanaan pembangunan, (3) Pemanfaatan aplikasi <i>Google Doc</i> dalam administrasi
5.	Penyusunan Laporan	Tim PKM akan membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan PKM dan membuat luaran hasil kegiatan yang telah di targetkan yaitu menulis artikel publikasi pada jurnal terakreditasi Sinta, menulis artikel publikasi pada media massa elektronik
6	Monitoring dan Evaluasi	Tahapan ini melakukan pengukuran terhadap kegiatan yang dilakukan dengan melihat sejauh mana pemanfaatan kegiatan PKM yang dilakukan bagi mitra Pemerintahan Desa dalam hal ini BPD Bandur Picak
7	Keberlanjutan Program	Tahapan ini melihat sejauh mana keberhasilan program PKM dalam rangka optimalisasi keberadaan BPD dalam keberlanjutan Pembangunan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu

Kegiatan PKM yang dilaksanakan terdapat beberapa partisipasi mitra untuk mendukung keberhasilan kegiatan, divisualisasikan pada gambar 6 berikut.

**Gambar 6.** Partisipasi Mitra Pemerintah Desa dan BPD Bandur Picak, Kampar



## Hasil dan Pembahasan

Desa Bandur Picak yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memiliki karakteristik wilayah perbatasan dengan kondisi geografis berupa perbukitan dan aliran sungai yang memengaruhi pola pembangunan desa. Keterbatasan infrastruktur jalan menyebabkan mobilitas masyarakat dan akses pelayanan publik belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai lembaga representasi masyarakat yang berfungsi melakukan pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPD Desa Bandur Picak masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pemahaman regulasi, kemampuan perencanaan pembangunan, administrasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Antlöv et al. (2016) yang menyatakan bahwa kelemahan utama kelembagaan desa di Indonesia terletak pada rendahnya kapasitas tata kelola dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Selain itu, Ginting et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas BPD sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di Desa Bandur Picak bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung prinsip *good village governance*.

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui pendekatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan menunjukkan adanya perubahan kapasitas kelembagaan BPD secara bertahap. Pada tahap penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman mengenai pembangunan desa berkelanjutan, fungsi BPD, dan tata kelola pemerintahan desa dalam kerangka Asta Cita. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan melalui pendekatan partisipatif mampu memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Temuan tersebut mendukung pandangan Hennink dan Kaiser (2022) bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat akan lebih efektif apabila disertai penguatan kapasitas aktor lokal secara berkelanjutan.

Pada tahap pelatihan, anggota BPD tidak hanya menerima materi teoritis, tetapi juga melakukan praktik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, evaluasi program, dan penggunaan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Pendekatan praktik langsung ini terbukti meningkatkan kemampuan administrasi dan dokumentasi kelembagaan sebesar 65%. Secara teoritis, hasil tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi desa dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Renukappa et al. (2022) yang menyatakan bahwa integrasi teknologi digital dalam tata kelola lokal mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat komunitas.

Selain peningkatan kapasitas teknis, kegiatan PKM juga memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa. Sebelum pelaksanaan program, tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa relatif rendah karena masyarakat memandang proses pembangunan masih bersifat elitis dan didominasi pemerintah desa. Setelah dilakukan pendampingan dan penguatan fungsi komunikasi BPD, tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari 60% menjadi 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi representatif BPD mampu menciptakan ruang deliberatif yang lebih inklusif dalam proses pembangunan desa. Temuan tersebut mendukung teori participatory governance yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BPD memerlukan proses pendampingan jangka panjang. Beberapa anggota BPD masih mengalami kendala dalam pemanfaatan teknologi digital dan penyusunan dokumen administrasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan desa tidak dapat dicapai hanya melalui pelatihan jangka pendek, tetapi membutuhkan keberlanjutan program, dukungan pemerintah desa, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa. Oleh karena itu, novelty kegiatan PKM ini terletak pada model penguatan kelembagaan BPD yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas tata kelola, dan digitalisasi administrasi desa sebagai strategi mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model tata kelola desa berbasis kelembagaan partisipatif dan berkelanjutan.

#### **a. Gambaran Lokasi Kegiatan**

Desa Bandur Picak terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lokasi desa berada di wilayah perbatasan dengan Sumatera Barat, sehingga memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan dan aliran sungai yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Sebagian besar jalan tanah dan jalan beraspal terbatas, sehingga mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi masih menghadapi kendala. Secara sosial, masyarakat Desa Bandur Picak memiliki struktur kelembagaan yang cukup aktif, termasuk keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra strategis pemerintah desa. Namun, kapasitas kelembagaan masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal.

#### **b. Mitra Kegiatan**

Mitra kegiatan PKM adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandur Picak yang berperan sebagai Pemerintahan Desa sekaligus mitra strategis pemerintah desa. Dalam kegiatan ini, mitra memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara tim pelaksana PKM dengan masyarakat desa, sehingga proses sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan dapat berjalan lebih efektif.

#### **c. Teknis Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Optimalisasi Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Keberlanjutan Pembangunan Desa di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu” telah dilaksanakan pada Tanggal 10 September 2025. Berjalan melalui tahapan yang saling melengkapi. Tahap awal dimulai dengan survei, di mana tim turun langsung ke lapangan, mendengarkan cerita warga, mengamati kondisi kelembagaan BPD, serta mencatat kebutuhan nyata desa. Setelah itu, sosialisasi dilakukan sebagai ruang pertemuan yang hangat, memperkenalkan tujuan PKM, manfaat yang diharapkan. Kegiatan penyuluhan, di mana tim PKM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyampaikan materi inti tentang desa sebagai fondasi pembangunan desa, arah pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, serta kedudukan BPD sebagai pengawal keberlanjutan pembangunan. Setelah penyampaian materi dilakukan maka dilanjutkan dengan sesi dialog tanya jawab, dapat dilihat pada gambar 7 Berikut.



**Gambar 7.** Dialog antara Tim PKM dengan BPD Bandur Picak

Tahap berikutnya adalah pelatihan, anggota BPD diajak berlatih menyusun perencanaan pembangunan, melakukan evaluasi pelaksanaan program, hingga menggunakan aplikasi *Google Doc/Google Drive*. Pelatihan ini berbentuk simulasi, dan praktik langsung, sehingga peserta benar-benar merasakan pengalaman nyata dalam mengelola desa, selanjutnya Tim PKM memberikan bantuan buku dengan Judul “Pemerintahan Desa di Indonesia” diharapkan buku ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada gambar 8 Berikut.



**Gambar 8.** Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan PKM Pada BPD di Desa Bandur Picak

Setelah kegiatan inti, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, untuk menilai sejauh mana kegiatan memberi dampak, sekaligus menemukan ruang perbaikan. Tahap terakhir adalah keberlanjutan program, yang dirancang agar hasil PKM tidak berhenti di satu waktu, melainkan berkelanjutan melalui pendampingan dan forum komunikasi rutin.

#### **d. Target dan Keberhasilan Kegiatan**

Target kegiatan PKM ini dirancang secara sistematis agar setiap tahapan mulai dari sosialisasi, penyuluhan, hingga pelatihan dapat memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Target kegiatan yang telah ditetapkan dijelaskan pada tabel 2. sebagai berikut.

**Tabel 2. Target dan Indikator Keberhasilan PKM**

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Target Utama</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
<b>Sosialisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun pemahaman awal anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat tentang tujuan serta manfaat PKM</li> <li>2. Membentuk komitmen bersama antara tim PKM, BPD, dan pemerintah desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran aktif anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat</li> <li>2. Terbentuknya kesepakatan bersama untuk mendukung program.</li> </ol>
<b>Penyuluhan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan anggota BPD mengenai: Desa sebagai penguatan pembangunan negara, Pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, Kedudukan BPD dalam keberlanjutan pembangunan desa</li> <li>2. Menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya peran BPD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan kembali materi inti.</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan musyawarah desa.</li> <li>3. Adanya komitmen BPD untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi.</li> </ol>
<b>Pelatihan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih anggota BPD dalam perumusan perencanaan pembangunan desa.</li> <li>b. Membekali anggota BPD dengan keterampilan evaluasi pelaksanaan pembangunan.</li> <li>c. Mengajarkan pemanfaatan aplikasi <i>Google Doc/ Google Drive</i> untuk administrasi kelembagaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya draft perencanaan pembangunan desa.</li> <li>2. Anggota BPD mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap program desa.</li> </ol> <p>Anggota BPD terbiasa menggunakan <i>Google Doc/Google Drive</i> untuk pengelolaan dokumen</p>

Luaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan dokumen sederhana perencanaan dan evaluasi pembangunan desa yang lebih sistematis.</li> <li>2. Terbentuknya forum komunikasi rutin antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan dan evaluasi tersedia.</li> <li>2. Forum komunikasi berjalan secara berkala.</li> </ol>
-----------------	---	---

**e. Kendala Pelaksanaan**

Terdapat sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PKM, baik dari aspek teknis maupun non-teknis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat masih terlihat, di mana keterlibatan warga belum merata, terutama dari kalangan muda dan perempuan, sehingga aspirasi yang masuk ke BPD belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok.
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan BPD, baik dalam hal pemahaman regulasi maupun keterampilan teknis administrasi, membuat proses penyuluhan dan pelatihan membutuhkan waktu lebih panjang untuk memastikan materi benar-benar dipahami.
3. Faktor infrastruktur dan teknologi juga menjadi hambatan, karena akses internet di desa masih terbatas sehingga pemanfaatan aplikasi digital seperti *Google Doc* tidak dapat berjalan optimal tanpa pendampingan intensif.
4. Faktor administratif muncul dalam bentuk birokrasi yang panjang dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas program, sehingga beberapa kegiatan membutuhkan penyesuaian jadwal.
5. Faktor sumber daya, keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi tantangan dalam menyediakan sarana pelatihan yang memadai.

**f. Gambaran IPTEKS**

Gambar 9. Gambaran IPTEKS Optimalisasi BPD



#### g. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan PKM diharapkan tidak berhenti pada tahap pelaksanaan semata, diperlukan sebuah rencana tindak lanjut yang jelas dan terarah. Rencana ini disusun sebagai upaya memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang telah dibangun melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan dapat terus berkembang serta memberi dampak nyata bagi kelembagaan BPD. Dengan adanya tindak lanjut, kegiatan PKM diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan program, memperkuat kapasitas BPD, serta menjaga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Berikut dijelaskan beberapa langkah rencana tindak lanjut

1. Pendampingan Berkelanjutan: Tim PKM tetap menjalin komunikasi dengan BPD melalui pertemuan berkala (*offline* maupun *online*).
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam workshop tambahan agar kapasitas kelembagaan semakin inklusif.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital: Mendorong penggunaan aplikasi *Google Doc* dan platform digital lain untuk administrasi, dokumentasi, dan transparansi.
4. Forum Komunikasi Rutin: Membentuk forum komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas aspirasi, evaluasi pembangunan, serta tindak lanjut kebijakan.

#### h. Peta Lokasi Kegiatan



Gambar 10. Peta Lokasi Desa Bandur Picak

#### i. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Tim PKM ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah mendukung dan

- membiayai kegiatan PKM tahun anggaran 2025.
2. DPPM UIR yang telah menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan ini.
  4. Pemerintah Desa dan BPD Bandur Picak yang telah menjadi mitra dan turut serta aktif dalam setiap tahapan kegiatan.
  5. Anggota Tim PKM yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk kesuksesan kegiatan PKM ini.

Dengan adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terima kasih atas kerja sama dan kontribusi yang luar biasa.

## Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan faktor penting dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis partisipatif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman anggota BPD terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan desa dan administrasi berbasis digital. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan yang tercermin dari meningkatnya pemahaman regulasi, kemampuan penyusunan dokumen perencanaan, serta partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif participatory governance dan good village governance yang menempatkan kelembagaan lokal sebagai aktor utama dalam pembangunan desa berkelanjutan. Penguatan kapasitas BPD terbukti tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mampu menciptakan ruang deliberatif yang lebih inklusif antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, integrasi digitalisasi administrasi desa menunjukkan bahwa transformasi tata kelola kelembagaan di tingkat desa dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada pengembangan model penguatan kelembagaan BPD yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas tata kelola, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi pembangunan desa berkelanjutan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan waktu pendampingan yang relatif singkat serta terbatasnya kemampuan sebagian anggota BPD dalam mengadopsi teknologi digital secara optimal. Selain itu, evaluasi dampak kegiatan masih berfokus pada perubahan kapasitas kelembagaan jangka pendek dan belum mengukur secara mendalam pengaruhnya terhadap kualitas pembangunan desa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan, penguatan kolaborasi multipihak, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah agar transformasi kelembagaan BPD dapat berjalan secara konsisten.

Ke depan, pengembangan program serupa perlu diarahkan pada penyusunan model kelembagaan desa berbasis smart governance, integrasi sistem administrasi digital desa, serta penguatan jejaring kolaboratif antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk menguji efektivitas model penguatan BPD pada konteks desa yang berbeda sehingga dapat

menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi SDGs Desa di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Agustina, I. F. (2024). BPD's Role in Village Development Planning. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), 10–21070. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1074>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): a governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, 7, 1581806. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Entsminger, J., Green, J. J., Wiatt, R., & Bednarik, Z. (2025). Multi-method research in the digital age: A methodological case study of a broad-scale rapid rural appraisal. *Community Development*, 56(5), 669–688. <https://doi.org/10.1080/15575330.2024.2438011>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, 15(24), 16706. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su152416706>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Goessling, K. P. (2020). Youth participatory action research, trauma, and the arts: designing youthspaces for equity and healing. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 33(1), 12–31. <https://doi.org/10.1080/09518398.2019.1678783>
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Maulidiah, S., Muslim, S., Rauf, R., Yuslimi, N., Hayati, R., & Rahyunir, M. H. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Negeri Kedah, Malaysia. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 757–769. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.53430>
- Maulidiah, S., Rauf, R., Manaf, H. A., & Khotami, K. (2023). Evaluation Of Simultaneous Village Head Elections In Kampar District, Riau Province In

2021. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 147–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i2.48887>
- Perrini, F., Costanzo, L. A., & Karatas-Ozkan, M. (2020). Measuring impact and creating change: a comparison of the main methods for social enterprises. *Corporate Governance*, 21(2), 237–251. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2020-0062>
- Renukappa, S., Suresh, S., Abdalla, W., Shetty, N., Yabbati, N., & Hiremath, R. (2022). Evaluation of smart village strategies and challenges. *Smart and Sustainable Built Environment*, 13(6), 1386–1407. <https://doi.org/10.1108/SASBE-03-2022-0060>
- Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2024). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. *The Social Science Journal*, 61(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782649>
- Wang, C.-Y., Yeh, I.-H., & Mark Liao, H.-Y. (2025). YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information. In A. Leonardis, E. Ricci, S. Roth, O. Russakovsky, T. Sattler, & G. Varol (Eds.), *Computer Vision – ECCV 2024* (pp. 1–21). Springer Nature Switzerland. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-72751-1\\_1#citeas](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-72751-1_1#citeas)